

SKRIPSI PERANCANGAN
PERMUKIMAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT
BERBASIS KONSERVASI DAN EDUKASI
DI KAMPUNG KAILI KABUPATEN BANTAENG



OLEH :

HILTON JR WIRADIRNATA

D511 15 009

DEPARTEMEN ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2020



HALAMAN PENGESAHAN

**PERMUKIMAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT BERBASIS
KONSERVASI DAN EDUKASI DI KAMPUNG KAILI KABUPATEN
BANTAENG**

Diajukan untuk memenuhi syarat kurikulum tingkat sarjana
pada Program Studi S1 Arsitektur Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Penyusun

Hilton JR Wiradirnata
D511 15 009

Gowa, 31 Agustus 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Ir. Hj. Idawarni J. Asmal, MT
NIP. 19650701 199403 2 001

Pembimbing II

Ir. H. Samsuddin Amin, MT
NIP. 19661231 199403 1 022

Mengetahui

Ketua Program Studi Arsitektur

Dr. Ir. H. Edward Syarif, MT.
NIP. 19690612 199802 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilton JR Wiradimata

NIM : D511 15 009

Departemen : SI Teknik Arsitektur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau tidak dapat dibuktikan bahwa atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 19 Agustus 2020

Penulis,


Hilton JR Wiradimata

Nim. D511 15 009



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: **PERMUKIMAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT BERBASIS KONSERVASI DAN EDUKASI Di KAMPUNG KAILI, KABUPATEN BANTAENG**, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan serta informasi yang diperoleh, penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ir. Hj. Idawarni J. Asmal, MT** selaku Pembimbing I dan Bapak **Ir. H. Samsuddin Amin, MT** selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan tugas akhir ini.
2. Orang Tua saya **Jacky Wiradirnata** dan **Rina Kubrus**, yang tanpa henti memberikan limpahan kasih sayang, doa, dan dukungan dalam segala hal.

Orang-orang lain yang turut membantu dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini adalah saudara-saudara saya **Venesia JR Wiradirnata** dan **Sheril JR Wiradirnata**, tanpa henti memberikan dukungan dalam segala hal.

Orang-orang lain yang turut membantu dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini adalah dosen-dosen labo perancangan permukiman, ibu **Dr. Ir. Idawarni J. Asmal**, selaku kepala labo perancangan permukiman, bapak **Ir. H. Samsuddin**



Amin, MT, bapak Dr. Edward Syarif, ST., MT, M.Eng, bapak M. Yahya Sirajuddin, ST., M.Eng, ibu Nurmaida Amri, ST., MT, dan ibu Nurul Nadjmi, ST., MT, dan ibu Rahma Hiromi ST., yang tanpa henti memberikan doa dan dukungan dalam segala hal.

5. Seluruh **Dosen dan Staff Jurusan Arsitektur.**
6. Segenap teman-teman **Jurusan Arsitektur Angkatan 2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin** terkhusus teman-teman Labo Perancangan Permukiman.
7. Segenap teman-teman **Jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Perkapalan,** terima kasih teman-teman atas dukungan dan doa selama ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Gowa, 19 Agustus 2020



Hilton JR Wiradirnata
Nim. D511 15 009



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
1. Non Arsitektural.....	4
2. Arsitektural.....	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
1. Tujuan	4
2. Sasaran	4
a. Non Arsitektural.....	4
b. Arsitektural.....	5
D. Lingkup Pembahasan	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Permukiman	7
B. Tinjauan Tentang Kawasan Pesisir	8
Definisi Perumahan dan Permukiman di Wilayah Pesisir	10
Tinjauan Tentang Budidaya Rumput Laut.....	11
Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir.....	12



F. Tinjauan Tentang Wisata Konservasi dan Edukasi.....	13
G. Tinjauan Tentang Sarana dan Prasarana Permukiman Budidaya Rumput Laut	14
1. Ruang Penjemuran	14
2. Ruang Penyimpanan.....	15
3. Jalan.....	15
4. Drainase.....	16
5. Air Bersih	17
6. Persampahan	19
H. Tahapan Budidaya Rumput Laut di Perairan	20
1. Pemilihan Lokasi.....	20
2. Melakukan Uji Penanaman	20
3. Menyiapkan Areal Budidaya.....	20
4. Memilih Metode Budidaya yang akan Digunakan.....	21
5. Penyediaan Bibit	21
6. Penanaman Bibit	22
7. Perawatan selama Pemeliharaan	22
8. Pemanenan	22
9. Pengeringan Hasil Panen.....	23
I. Tinjauan Khusus	23
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantaeng	23
a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantaeng.....	23
b. Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantaeng.....	24
c. Kawasan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di Kabupaten Bantaeng	25
d. Kondisi Klimatologi Kabupaten Bantaeng.....	25
e. Kependudukan Kabupaten Bantaeng.....	26
f. Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Bantaeng	29
2. Gambaran Wilayah Kecamatan Bisappu	30
a. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Bisappu.....	30
b. Jumlah Penduduk Kecamatan Bisappu	31



c.	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bisappu.....	33
d.	Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bisappu	35
3.	Gambaran Wilayah Kelurahan Bonto Lebang	35
a.	Kondisi Geografis Kelurahan Bonto Lebang	35
b.	Administrasi Kelurahan Bonto Lebang.....	36
c.	Topografi Kelurahan Bonto Lebang	36
d.	Kependudukan Kelurahan Bonto Lebang	36
e.	Sarana dan Prasarana Kelurahan Bonto Lebang	37
f.	Potensi Kelurahan Bonto Lebang.....	38
1)	Keamanan	38
2)	Kebersihan	39
3)	Pemberdayaan Masyarakat	39
4)	Permukiman	39
5)	Kelembagaan	40

BAB III METODE PERANCANGAN.....	41
A. Jenis Pembahasan.....	41
B. Waktu Pembahasan	41
C. Pengumpulan Data	41
1. Survei Lapangan.....	41
2. Studi Pustaka.....	42
3. Studi Banding.....	43
a. Kawasan Budidaya Rumput Laut di Pantai Pandawa.....	43
b. Permukiman Petani Rumput Laut di Kelurahan Ela – Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.....	49
c. PPLH Puntondo (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo) Takalar	56
d. Kesimpulan Studi Banding	63
Teknik Penulisan Data	66
Landasan Konseptual Perancangan.....	67



BAB IV ANALISIS PERANCANGAN PERMUKIMAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT BERBASIS KONSERVASI DAN EDUKASI DI KAMPUNG KAILI, KABUPATEN BANTAENG	68
A. Analisis Lokasi Perancangan	68
1. Kesesuaian Fungsi Lahan.....	68
2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Lingkungan	68
B. Analisis Site Perancangan	69
1. Luasan Tapak	69
2. Kontur Tapak	70
3. Sinergitas dengan Lingkungan.....	70
4. Potensi Topografi Kaitannya dengan Genangan/Banjir.....	70
5. Potensi Masalah Sosial di Sekitar Tapak	70
C. Analisis Rancangan Fisik Arsitektural.....	70
1. Analisis Bentuk Bangunan.....	70
2. Analisis Tata Ruang Dalam (<i>Interior</i>)	70
3. Analisis Tata Ruang Luar (<i>Eksterior</i>)	71
4. Analisis Sistem Struktur.....	71
5. Analisis Sistem Penghawaan	71
6. Analisis Sistem Pencahayaan.....	71
7. Analisis Sistem Komunikasi	72
8. Analisis Sistem Penjaringan Air Bersih.....	72
9. Analisis Sistem Pembuangan Air Kotor	72
10. Analisis Sistem Kelistrikan	72
11. Analisis Sistem Pengamanan Terhadap Kebakaran.....	73
12. Analisis Sistem Pembuangan Sampah	73

BAB V KONSEP PERANCANGAN PERMUKIMAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT BERBASIS KONSERVASI DAN EDUKASI DI KAMPUNG KAILI, KABUPATEN BANTAENG	74
---	-----------

Konsep Pemilihan Lokasi	74
Konsep Pemilihan Site Perancangan.....	76



C. Analisis Tapak.....	81
1. <i>Existing</i> Kondisi	81
2. Sirkulasi Tapak.....	82
3. Orientasi Matahari	83
4. Arah Hembusan Angin	84
5. <i>View</i> Kedalam.....	85
6. <i>View</i> Keluar	86
7. Tingkat Kebisingan	88
8. Penzoningan	89
9. Rencana <i>Layout</i> Tapak	90
D. Analisis Dasar Perancangan Makro dan Mikro	90
1. Analisis Aktivitas	90
a. Studi Aktivitas	90
b. Studi Pelaku Aktivitas	91
2. Analisis Penentuan Fasilitas	93
3. Besaran Ruang.....	94
a. Perhitungan Kebutuhan Ruang.....	94
b. Perhitungan Kebutuhan Parkir.....	100
1) Pengunjung.....	100
4. Analisis Pola Hubungan Ruang Mikro.....	101
E. Konsep Dasar Fisik Bangunan	108
1. Gubahan Bentuk dan Filosofi.....	108
2. Sistem Struktur.....	109
a. Substruktur	110
b. <i>Super</i> Struktur	111
c. <i>Upper</i> Struktur	112
3. Bahan Bangunan	112
4. Konsep Lansekap	113
a. <i>Softscape</i>	113
b. <i>Hardscape</i>	114
5. Konsep <i>Interior</i>	115



F. Konsep Dasar Perlengkapan Bangunan	116
1. Sistem Pengkondisian Bangunan	116
a. Sistem Pencahayaan	116
1) Pencahayaan Alami.....	116
2) Pencahayaan Buatan	117
b. Sistem Penghawaan.....	117
1) Sistem Penghawaan Alami	117
2) Sistem Penghawaan Buatan	117
2. Sistem Utilitas	118
a. Jaringan Air Bersih	118
b. Jaringan Air Kotor.....	118
c. Sistem Jaringan Listrik.....	119
d. Sistem Komunikasi	119
e. Sistem Pembuangan Sampah	120
f. Sistem Pengamanan Bangunan dan Kawasan.....	120
g. Sistem Pengamanan Kebakaran	121
h. Sistem Penangkal Petir.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN GAMBAR.....	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2016	24
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bantaeng	24
Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng	25
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bantaeng	26
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantaeng (Jiwa), Tahun 2010-2016	28
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2010, 2015, dan 2016	28
Gambar 2.7 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bantaeng (Ton), Tahun 2016.....	29
Gambar 2.8 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Bisappu di Kabupaten Bantaeng	31
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bisappu Tahun 2016	32
Gambar 2.10 Piramida Penduduk di Kecamatan Bisappu Tahun 2016.....	32
Gambar 2.11 Produksi Padi di Kecamatan Bisappu (Ton), Tahun 2012-2016.....	33
Gambar 2.12 Produksi Perkebunan di Kecamatan Bisappu (Ton), Tahun 2012-2016.....	34
Gambar 2.13 Populasi Ternak Besar di Kecamatan Bisappu (Ekor), Tahun 2012-2016.....	34
Gambar 3.1 Pantai di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng	42
Gambar 3.2 Budidaya Rumput Laut di Kampung Kaili	42
Gambar 3.3 Pantai Pandawa, Bali.....	43
Gambar 3.4 Observasi Partisipatif dalam Menanam Rumput Laut di Pantai Pandawa, Bali.....	44



Gambar 3.5 Akses Menuju Kawasan Budidaya Rumput Laut	45
Gambar 3.6 Area Parkir Pantai Pandawa, Bali	46
Gambar 3.7 Pusat Informasi Pantai Pandawa, Bali	46
Gambar 3.8 Zona Budidaya Rumput Laut Pantai Pandawa.....	46
Gambar 3.9 Zona Pariwisata Pantai Pandawa.....	47
Gambar 3.10 Tempat Penyewaan Kano di Pantai Pandawa	47
Gambar 3.11 Musholla Pantai Pandawa	47
Gambar 3.12 Toilet Dan Ruang Ganti Pantai Pandawa.....	48
Gambar 3.13 Pondok Petani Rumput Laut Pantai Pandawa.....	48
Gambar 3.14 Warung Hasil Olahan Rumput Laut Pantai Pandawa.....	48
Gambar 3.15 Taman Cekkeng, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.....	49
Gambar 3.16 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Permukiman Petani Rumput Laut Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng.....	51
Gambar 3.17 Ruang Penjemuran Rumput Laut, Kelurahan Ela-Ela	54
Gambar 3.18 Kondisi Jaringan Persampahan di Kelurahan Ela-Ela.....	55
Gambar 3.19 PPLH Puntondo, Takalar.....	56
Gambar 3.20 Pendopo PPLH Puntondo, Takalar	58
Gambar 3.21 Ruang Seminar PPLH Puntondo, Takalar	58
Gambar 3.22 Perpustakaan PPLH Puntondo	59
Gambar 3.23 Kapal Dan Perlengkapan Renang di PPLH Puntondo	60
Gambar 3.24 <i>Bungalaw</i> PPLH Puntondo, Takalar	60
Gambar 3.25 Asrama PPLH Puntondo, Takalar	61
Gambar 3.26 Restoran PPLH Puntondo, Takalar	62
Gambar 3.27 Tempat Penjemuran Rumput Laut Puntondo.....	62
Gambar 3.28 Landasan Konseptual Perancangan	67



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Bisappu.....	68
Gambar 5.1 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bantaeng (Ton), Tahun 2016.....	76
Gambar 5.2 Peta Wilayah Kecamatan Bisappu	77
Gambar 5.3 Posisi Geografis Tapak Perancangan	79
Gambar 5.4 Posisi Tapak Perancangan Terhadap Sarana Lingkungan.....	80
Gambar 5.5 Ukuran Tapak Lokasi Perancangan.....	81
Gambar 5.6 <i>Existing</i> Kondisi Tapak Kampung Kaili	81
Gambar 5.7 Sirkulasi Tapak Kampung Kaili	82
Gambar 5.8 Arah Orientasi Matahari di Kampung Kaili	83
Gambar 5.9 Arah Hembusan Angin di Kampung Kaili.....	84
Gambar 5.10 <i>View</i> Kedalam Kampung Kaili.....	85
Gambar 5.11 <i>View</i> Keluar Kampung Kaili	86
Gambar 5.12 Tingkat Kebisingan di Kampung Kaili	88
Gambar 5.13 Penzoningan Kawasan Permukiman Kampung Kaili	89
Gambar 5.14 Rencana <i>Layout</i> Tapak Kampung Kaili	90
Gambar 5.15 Pola Hubungan Ruang Makro	94
Gambar 5.16 Matriks Hubungan Ruang Makro.....	94
Gambar 5.17 Pola Hubungan Ruang Mikro <i>Home Stay</i> Tipe A	101
Gambar 5.18 Matriks Hubungan Ruang <i>Home Stay</i> Tipe A.....	101
Gambar 5.19 Pola Hubungan Ruang Mikro <i>Home Stay</i> Tipe B	102
Gambar 5.20 Matriks Hubungan Ruang <i>Home Stay</i> Tipe B	102
Gambar 5.21 Pola Hubungan Ruang Mikro Zona Budidaya Rumput Laut.....	103
Gambar 5.22 Matriks Hubungan Ruang Zona Budidaya Rumput Laut.....	103
Gambar 5.23 Pola Hubungan Ruang Mikro Galeri.....	104



Gambar 5.24 Matriks Hubungan Ruang Galeri	104
Gambar 5.25 Pola Hubungan Ruang Mikro Restoran	105
Gambar 5.26 Matriks Hubungan Ruang Restoran	105
Gambar 5.27 Pola Hubungan Ruang Mikro Toko Souvenir (<i>Gift Shop</i>).....	106
Gambar 5.28 Matriks Hubungan Ruang Toko Souvenir (<i>Gift Shop</i>).....	106
Gambar 5.29 Pola Hubungan Ruang Mikro Posyandu	107
Gambar 5.30 Matriks Hubungan Ruang Posyandu	107
Gambar 5.31 Pola Hubungan Ruang Mikro Toilet Umum (MCK)	108
Gambar 5.32 Matriks Hubungan Ruang Toilet Umum (MCK).....	108
Gambar 5.33 Konsep Bentuk Bangunan	109
Gambar 5.34 Potongan dan Perspektif Pondasi Batu Kali.....	110
Gambar 5.35 Pondasi Pundak	111
Gambar 5.36 Sistem Struktur Kayu Dan Struktur Beton Bertulang	111
Gambar 5.37 Rangka Atap Kayu dan Rangka Atap Baja Ringan.....	112
Gambar 5.38 Vegetasi Tata Ruang Luar	114
Gambar 5.39 Elemen <i>Hardscape</i> Tata Ruang Luar	115
Gambar 5.40 Contoh Penerapan Gaya Arsitektur <i>Rustic</i>	116
Gambar 5.41 Skema Sistem Air Bersih	118
Gambar 5.42 Skema Pembuangan Air Kotor.....	119
Gambar 5.43 Skema Jaringan Listrik.....	119
Gambar 5.44 Kentongan Bambu.....	120
Gambar 5.45 Skema Pembuangan Sampah	120
Gambar 5.46 Pos Jaga.....	121
Gambar 5.47 Sistem APAR Dan Sistem <i>Pilar Hydrant</i>	121
Gambar 5.48 Sistem Penangkal Petir Tongkat Franklin.....	122



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas-Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang.....	36
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Usia Kelurahan Bonto Lebang	37
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Bonto Lebang	37
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Bonto Lebang	37
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan di Kelurahan Ela-Ela	50
Tabel 3.2 Kesimpulan Studi Banding	63
Tabel 5.1 Mekanisme Pemilihan Tapak Dengan Sistem Bobot Dan Nilai	77
Tabel 5.2 Pengelompokan Aktivitas	92
Tabel 5.3 Besaran Ruang <i>Home Stay</i> Tipe A.....	95
Tabel 5.4 Besaran Ruang <i>Home Stay</i> Tipe B.....	96
Tabel 5.5 Besaran Ruang Zona Budidaya Rumput Laut.....	97
Tabel 5.6 Besaran Ruang Zona Konservasi Dan Edukasi.....	97
Tabel 5.7 Besaran Ruang Restoran	98
Tabel 5.8 Besaran Ruang Toko Souvenir (<i>Gift Shop</i>).....	99
Tabel 5.9 Besaran Ruang MCK	99
Tabel 5.10 Besaran Ruang Posyandu.....	99
Tabel 5.11 Jumlah Kebutuhan Ruang Permukiman Pembudidaya Rumput Laut Berbasis Konservasi Dan Edukasi di Kampung Kaili.....	100



ABSTRAK

Menurut Undang–Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman pembudidaya rumput laut adalah suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut. Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai Sentra Pengolahan Rumput Laut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor: KEP.08/DJP2HP/2009. Dengan berkembangnya potensi budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Bantaeng, mendukung pula pertumbuhan permukiman khususnya yang ada di sungai dan pesisir pantai yang menjadi orientasi utama dalam proses budidaya rumput laut. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng 2015, Bisappu merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra penghasil rumput laut kedua terbesar di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan persentase 31,20 %. Bonto Lebang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bissappu. Kondisi Permukiman pembudidaya rumput laut yang berada di wilayah pesisir Kampung Kaili tumbuh secara tidak teratur, terkesan padat, mengakibatkan kualitas lingkungan tidak layak huni. Apalagi perkembangan budidaya rumput laut sekarang ini yang kian meningkat maka tentunya perlu dilakukan penataan sesuai dengan karakteristik ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Permukiman, Pembudidaya, Rumput Laut, Kampung Kaili,

g.



ABSTRACT

According to Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, residential areas are part of the environment outside a protected area, both in the form of urban and rural areas, which function as a residential or residential environment and a place for activities that support life and livelihood. Seaweed cultivator settlements are settlements where most of the population are people who have jobs as seaweed farmers. Bantaeng Regency is designated as a Seaweed Processing Center through the Decree of the Director General of Processing and Marketing of Fishery Products Number: KEP.08 / DJP2HP / 2009. With the development of the potential for seaweed cultivation in Bantaeng Regency, it also supports the growth of settlements, especially those in rivers and coastal areas which are the main orientation in the process of cultivating seaweed. According to 2015 data from the Bantaeng Regency Marine and Fisheries Service, Bisappu is one of the sub-districts which is the second largest seaweed producing center in Bantaeng Regency with a percentage of 31.20%. Bonto Lebang is one of the villages located in the Bissappu District. Settlement conditions for seaweed cultivators in the coastal area of Kaili Village grow irregularly, seem dense, resulting in the quality of the environment being unfit for habitation. Moreover, the development of seaweed cultivation is currently increasing, of course, it is necessary to make arrangements according to the economic, social and environmental characteristics of the local community.

Keywords: Settlement, Cultivators, Seaweed, Kaili Village, Bantaeng.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang–Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokkan sebagai kawasan yang direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya.

Permukiman merupakan suatu kawasan yang mempunyai masalah kompleks dan sangat berkaitan erat dengan proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya sehingga dalam hal ini sangat diperlukan adanya penataan permukiman yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu contoh kawasan permukiman yang harus dilakukan penataan sesuai dengan karakteristiknya yaitu pada kawasan permukiman petani rumput laut.

Permukiman pembudidaya rumput laut adalah suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut. Masyarakat petani rumput laut seringkali dinilai sebagai kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tergolong sebagai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, bukan berarti mereka tidak harus diperhatikan oleh pemerintah karena kawasan permukiman petani rumput laut juga harus mempunyai ataupun memenuhi prinsip–prinsip layak huni sesuai dengan Undang–Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai Sentra Pengolahan Rumput Laut
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil



Perikanan Nomor: KEP.08/DJP2HP/2009. Dengan berkembangnya potensi budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Bantaeng, mendukung pula pertumbuhan permukiman khususnya yang ada di sungai dan pesisir pantai yang menjadi orientasi utama dalam proses budidaya rumput laut yang terkesan tidak teratur dan tidak terkendali. Permukiman petani rumput laut yang terbangun secara spontan seringkali dinilai sebagai permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pola permukiman tumbuh secara tidak teratur, terkesan padat, mengakibatkan kualitas lingkungan tidak layak huni. Kondisi sarana prasarana dan kualitas lingkungan untuk pengolahan rumput laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai jual/kualitas dari rumput laut. Kegiatan masyarakat sebagai petani rumput laut haruslah didukung dengan kondisi permukiman tempat tinggal serta sarana prasarana yang menunjang.

Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Bantaeng meliputi Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarangeke, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Uluere.

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng 2015, Bissappu merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra penghasil rumput laut kedua terbesar di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan persentase 31,20 %. Bonto Lebang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang memiliki sumber daya rumput laut yang berada dibagian Barat Kabupaten Bantaeng. Pusat pemerintahan Kelurahan Bonto Lebang terletak di kampung Beloparang dan secara administratif Kelurahan Bonto Lebang terbagi atas 3 kampung yaitu Kampung Beloparang, Kampung Cambalolong, Kampung Kaili.

Kampung Kaili terletak pada koordinat 5°32'48"S 119°55'44"E, terdiri dari I RW, II RT, dan merupakan wilayah yang terletak pada dataran rendah (n) di Kelurahan Bonto Lebang yang memiliki sumber daya alam rumput laut yang dimanfaatkan untuk mata pencaharian warga Kampung Kaili sebagian besar sebagai petani rumput laut yaitu sebanyak 256 orang (Data Kelurahan Bonto Lebang). Kondisi



Permukiman pembudidaya rumput laut yang berada di wilayah pesisir Kampung Kaili tersebut terbangun secara spontan seringkali dinilai sebagai permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pola permukiman tumbuh secara tidak teratur, terkesan padat, mengakibatkan kualitas lingkungan tidak layak huni. Kondisi sarana dan prasarana dan kualitas lingkungan untuk budidaya rumput laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai jual/ kualitas dari rumput laut. Kegiatan masyarakat sebagai petani rumput laut haruslah didukung dengan kondisi permukiman tempat tinggal serta sarana dan prasarana yang menunjang. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di permukiman petani rumput laut saat ini kurang maksimal, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan budidaya rumput laut seperti kondisi ruang penjemuran, ruang penyimpanan (gudang), jalan, drainase, air bersih dan persampahan.

Apalagi perkembangan budidaya rumput laut sekarang ini yang kian meningkat maka tentunya secepatnya perlu dilakukan penataan sesuai dengan karakteristik ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat setempat baik itu penataan permukiman maupun aktivitas masyarakat agar kendala dan permasalahan yang timbul saat ini tidak berkelanjutan dan mengganggu aktivitas masyarakat petani rumput laut di Kampung Kaili. Jika penataan lingkungan permukiman petani rumput laut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kualitas lingkungan akan tetap terpelihara dan petani rumput laut pun bisa mendapatkan keuntungan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun jika permukiman petani rumput laut tidak tertata dengan baik maka kualitas lingkungan akan menurun dan mudah tercemar, hal ini tentu saja berdampak pada tingkat produktivitas petani rumput laut itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan konsep “Permukiman Pembudidaya Rumput Laut berbasis Konservasi dan Edukasi di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.”



B. Rumusan Masalah

1. Non Arsitektural

- a. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam rumput laut Kampung Kaili dengan mengacu pada peningkatan mutu pendidikan dan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam yang tersedia ?
- b. Bagaimana cara menjadikan Kampung Kaili sebagai salah satu permukiman berbasis konservasi dan edukasi rumput laut yang dikenal secara global ?

2. Arsitektural

- a. Bagaimana menentukan dan merumuskan konsep perancangan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili ?
- b. Bagaimana menentukan kebutuhan dan besaran ruang serta tatanan massa yang baik untuk menunjang aktivitas/kegiatan di permukiman pembudidaya rumput laut Kampung Kaili ?

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Menyusun suatu konsep perancangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perancangan fisik permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng.

2. Sasaran

Terwujudnya sebuah permukiman pembudidayaan rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili yang mampu memenuhi sasaran-sasaran berikut:

a. Non Arsitektural

- 1) Mengadakan studi tentang kemungkinan pengadaan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili.



- 2) Mengetahui teori yang dibutuhkan untuk merancang sebuah permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi.
- 3) Menguraikan kegiatan–kegiatan dalam permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi sebagai wadah yang menampung upaya pelestarian dan pengelolaan rumput laut.

b. Arsitektural

- 1) Mendapatkan konsep perancangan yang meliputi standar bangunan secara fungsional.
- 2) Menentukan sistem pembagian ruang secara fleksibel terhadap fungsi bangunan yang berbeda–beda.

D. Lingkup Pembahasan

1. Pembahasan ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi dan spesifikasi perencanaan.
2. Pembahasan diarahkan pada pembahasan arsitektural yang merupakan alternatif rancangan perancangan tapak, tata fisik bangunan bermassa, ungkapan program ruang, serta sistem struktur dan persyaratan ruang.
3. Disiplin ilmu lain yang mendukung dalam pembahasan digunakan sebagai referensi sekunder.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan acuan perancangan ini, sistematika pembahasan dibagi dalam beberapa bab dan sub–bab yang berisikan penjelasan dalam proses perancangan Permukiman Pembudidaya Rumput Laut berbasis Konservasi dan Edukasi di Kampung Kaili. Sistematika tersebut antara lain:

Bab I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, lingkup studi, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang permukiman pembudidaya rumput laut dan perkembangannya. Batasan penjelasan dari bab ini ialah pengertian dan pemahaman pengadaan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili, pengertian fungsi, kegiatan dan fasilitas dalam satu kompleks permukiman pembudidaya rumput laut.

Bab III. Metode Perancangan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode perancangan yang akan digunakan dalam perancangan permukiman pembudidaya rumput laut ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah sistematis dan teknis dalam hal perancangan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi.

Bab IV. Analisis Perancangan

Berisi analisis terhadap hal-hal yang terkait dengan perencanaan dan perancangan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi di Kampung Kaili yang mencakup analisis kegiatan dan ruang, analisis fisika bangunan, analisis sistem utilitas, analisis site, dan analisis visual bentuk bangunan.

Bab V. Kesimpulan dan Konsep Perancangan

Bab ini akan berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang akan dijadikan sebagai konsep dasar acuan dalam merancang pemukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai konsep dasar perancangan permukiman pembudidaya rumput laut berbasis konservasi dan edukasi, mulai dari konsep bentuk, konsep tata massa, konsep *interior* dan *eksterior*, konsep lansekap, konsep struktur, hingga konsep *plumbing*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Permukiman

Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan. Permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk/pemukim tinggal, berkisah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan.

Doxiadis (1974) dalam Yusuf (2017) mengatakan bahwa permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 (lima) unsur utama yaitu:

1. Alam (*nature*), lingkungan biotik maupun *abiotic*. Permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar.
2. Manusia (*antropos*), permukiman dipengaruhi oleh dinamika dan kinerja manusia.
3. Masyarakat (*society*), hakekatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. Aspek-aspek dalam masyarakat yang mempengaruhi permukiman antara lain : kepadatan dan komposisi penduduk, stratifikasi sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum.
4. Ruang kehidupan (*shell*), ruang kehidupan menyangkut berbagai unsur dimana manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat melaksanakan kiproah kehidupannya.
5. Jaringan (*network*), yang menunjang kehidupan (jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, telekomunikasi, listrik).

Kuswartojo Tjuk dan Suparti AS (1997) dalam Yusuf (2017), mengatakan konsep permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan permukiman, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai kawasan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung



perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian plus prasarana dan sarana lingkungan.

Sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman), sedangkan prasarana meliputi jaringan transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana angkutan, dan jaringan utilitas seperti : air bersih, air kotor, pengaturan air hujan, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan listrik dan sistem pengelolaan sampah.

Permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk/pemukim tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan. Secara totalitas permukiman ada 5 (lima) unsur yang sangat berpengaruh dalam permukiman yaitu: alam, manusia, masyarakat, ruang kehidupan dan jaringan bersosialisasi. Dalam bermukim juga diperhatikan sistem sarana lingkungan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tinjauan Tentang Kawasan Pesisir

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai wilayah pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal pemahaman dari studi ini. Pengertian tentang pesisir sampai saat ini masih menjadi suatu pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang lingkup wilayah pesisir yang secara batasan wilayah masih belum jelas. Berikut ini adalah definisi dari beberapa sumber mengenai wilayah pesisir.

Kay dan Alder (1999) dalam Yusuf (2017) "*The band of dry land adjacent to ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa*".
Menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau



batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.

Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Dahuri, dkk, 2001 dalam Yusuf 2017).

Suprihayono (2007) dalam Yusuf (2017) mengatakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering, maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena merupakan tempat pencampuran antara daratan dan lautan, ini berpengaruh terhadap kondisi fisik dimana pada umumnya daerah yang berada di sekitar memiliki kontur yang relatif datar.

Adanya kondisi seperti ini sangat mendukung bagi wilayah pesisir dijadikan daerah yang potensial dalam pengembangan wilayah keseluruhan. Hal ini menunjukkan garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayalan yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai.

Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit. Menurut UU No. 27 Tahun tentang Batasan Wilayah Pesisir, kearah daratan mencakup wilayah



administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu (1) sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas, (2) penerima limbah, (3) penyedia jasa–jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*), (4) penyedia jasa–jasa kenyamanan (*amenity services*) (Bengen, 2001 dalam Yusuf 2017).

Karakteristik pantai secara geomorfologi menurut Hantoro (2004) dalam Yusuf (2017) adalah pantai curam singkapan batuan, pantai landai atau dataran, pantai dataran endapan lumpur, pantai dengan bukit atau paparan pasir, pantai lurus dan panjang dari pesisir datar, pantai dataran tebing karang, pantai erosi, Pantai akresi. Karakteristik ekosistem di perairan laut dangkal pada umumnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove pada dasarnya dilindungi seperti pada tertera di dalam UU No.32/2009 dan UU No. 5/1990.

C. Definisi Perumahan dan Permukiman di Wilayah Pesisir

Pengertian dasar permukiman dalam Undang–Undang No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuanperumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyaipenunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman merupakan satuan ruang yang dibentuk oleh 5 elemen: *nature, shells, network*, dan melibatkan adanya jalinan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang terkait dengan perikehidupan dan penghidupan (*man and society*) di dalamnya.

Koestoer (1995) dalam Yusuf (2017) mengatakan bahwa batasan permukiman adalah terkait erat dengan konseplingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yangdigunakan sebagai lingkungan tempat

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perian dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan. Parwata (2004)



dalam Yusuf (2017) menyatakan bahwa permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Permukiman, dan secara khusus disebut sebagai bangunan rumah (Hudson, 1974; Hammond, 1979 dalam Ritohardoyo, 2001 dalam Yusuf 2017). Dua aspek penting dari pernyataan tersebut mempunyai makna: (1) permukiman mempunyai kedudukan penting dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping kebutuhan pangan, pakaian/sandang, dan kebutuhan dasar lainnya; serta (2) dalam pemenuhan kebutuhan permukiman.

Secara tersirat mengandung banyak permasalahan yang terkait dengan keragaman wilayah maupun keragaman dinamika penghuninya. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Perumahan merupakan wadah fisik, sedang permukiman merupakan paduan antara wadah dengan isinya, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dengan unsur budaya dan lingkungannya.

Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan. Perumahan merupakan satuan ruang yang dibentuk oleh 3 elemen: lingkungan hidup/ alam (*nature*), kelompok rumah (*shells*), dan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (*network*). Dalam Pedoman RP4D, istilah Perumahan dan Permukiman dipergunakan dalam satu kesatuan pengertian yang tidak terpisahkan.

D. Tinjauan Tentang Budidaya Rumput Laut

Dalam pembangunan di wilayah pesisir, salah satu pengembangan kegiatan ekonomi yang sedang digalakkan pemerintah adalah pengembangan budidaya rumput laut. Melalui program ini diharapkan dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah akibat meningkatnya pendapatan

di tingkat setempat. Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis tahun 1980-an dalam upaya merubah kebiasaan penduduk pesisir dari pemanfaatan sumberdaya alam ke arah budidaya rumput laut yang ramah



lingkungan dan usaha budidaya ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya juga dapat digunakan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan perairan pantai (Ditjenkan Budidaya, 2004 dalam Yusuf 2017). Pengembangan budidaya rumput laut merupakan salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai keunggulan dalam hal : (1) produk yang dihasilkan mempunyai kegunaan yang beragam, (2) tersedianya lahan untuk budidaya yang cukup luas serta (3) mudahnya teknologi budidaya yang diperlukan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 dalam Yusuf 2017).

E. Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Horton et al (1991) dalam Kurniastuty (2003) dalam Yusuf (2017), mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut.

Masyarakat terdiri dari individu, kelompok dan komunitas yang saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupan (Supriatna, 1997 dalam Yusuf 2017).

Masyarakat pesisir dapat dikatakan sebagai masyarakat yang menetap atau yang secara langsung terlibat dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Mereka berusaha atau bermata pencaharian di daerah tersebut. Masyarakat pesisir merupakan seluruh masyarakat yang berdomisili, menggantungkan kehidupannya dan mempunyai aktifitas di wilayah pesisir, terdiri dari berbagai suku, budaya dan tingkat kehidupan yang berbeda.

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Menurut Satria (2002) dalam Kurniastuty (2003) dalam Yusuf (2017), masyarakat agraris yang

atasikan sebagai kaum petani menghadapi sumberdaya yang terkontrol, pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan output yang dapat diprediksi. Sifat produksi seperti itu memungkinkan tetapnya lokasi



produksi sehingga mobilitas usaha relatif rendah dan elemen resiko pun tidak terlalu besar.

Masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah masyarakat nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat petani. Akan tetapi menurut Firth (1946) dalam Kurniastuty (2003) dalam Yusuf (2017), masyarakat nelayan itu juga memiliki kemiripan dengan masyarakat petani. Misalnya, sifat usaha mereka yang berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar sederhana. Eksploitasi sering terjadi berkaitan dengan masalah kerjasama dan sebagian besar dari mereka bergantung pada produksi yang bersifat subsisten. Selain itu, mereka memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonomi.

Berdasarkan pendapat Kurniastuty tersebut, maka usaha pembudidaya ikan dapat di golongkan ke dalam usaha masyarakat pertanian (agraris), sehingga dalam hal ini usaha pembudidayaan rumput laut juga dapat digolongkan ke dalam usaha masyarakat pertanian (agraris) karena sifat sumberdaya yang dihadapi relatif mirip. Kemiripannya terletak pada penentuan jumlah, tempat dan waktu pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan pola panen yang terkontrol, karena adanya input produksi seperti benih, teknologi dan lain-lain.

F. Tinjauan Tentang Wisata Konservasi dan Edukasi

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) laut secara individu maupun jaringan merupakan alat utama dalam melindungi keanekaragaman hayati perairan laut. Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi juga merupakan pilar dari hampir semua strategi konservasi nasional dan internasional yang berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, melindungi spesies yang terancam, dan mitigasi perubahan iklim (Dudley, 2008 dalam Widhiarini 2016).

Menurut Rodger (1998:28 dalam Widhiarini 2016), wisata edukasi atau *edutourism* adalah suatu program dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi

dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di objek wisata yang dikunjungi. Program pariwisata pendidikan dapat berupa pertukaran siswa antara lembaga pendidikan (*student exchanges*),



ekowisata (*ecotourism*), wisata warisan (*heritage tourism*), wisata komunitas (*community tourism*), maupun wisata pedesaan atau pertanian (*rural/farm tourism*). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wisata konservasi dan edukasi adalah suatu jenis wisata yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pemahaman terhadap pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan atau pencemaran untuk keberlangsungan ekosistem makhluk hidup dan lingkungannya.

G. Tinjauan Tentang Sarana dan Prasarana Permukiman Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut memberikan perubahan yang baik terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir, Kondisi sarana dan prasarana dan kualitas lingkungan untuk budidaya rumput laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai jual/kualitas dari rumput laut. Kegiatan masyarakat sebagai petani rumput laut haruslah didukung dengan kondisi permukiman tempat tinggal serta sarana dan prasarana yang menunjang. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di permukiman petani rumput laut saat ini kurang maksimal, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan budidaya rumput laut seperti ruang penjemuran, ruang penyimpanan (gudang), sanitasi (drainase), air bersih dan persampahan.

1. Ruang Penjemuran

Ruang penjemuran yang dimaksud adalah proses pengeringan atau penjemuran rumput laut. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air pada bahan tersebut dengan menggunakan energi panas (Desrosier, 1988 dalam Yusuf 2017). Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari di atas para-para atau waring supaya tidak terkotori oleh pasir atau tanah. Penjemuran dilakukan di tempat terbuka, jauh dari pemukiman penduduk

dan jauh dari pantai sehingga sinar matahari maksimal.



2. Ruang Penyimpanan

Ruang penyimpanan yang dimaksud adalah suatu tempat atau gudang milik kelompok tani untuk menyimpan sementara rumput laut yang telah dikeringkan lalu dikemas ke dalam karung sebelum dijual ke pengepul maupun ke pabrik-pabrik.

3. Jalan

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1980 tentang jalan, jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan seperti jembatan, lintas atas (*over pass*), lintas bawah (*under pass*) dan lain-lain. Sedangkan perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu dan marka jalan, pagar pengaman lalu lintas, pagar damija dan sebagainya.

Klasifikasi jalan berdasarkan peranan, yang membagi ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan sistem primer, berdasarkan PP No. 26 tahun 1985 adalah:

a. Jalan Arteri Primer

Adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu lainnya yang berdampingan, serta ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua (pasal 4 ayat 2).

b. Jalan Kolektor Primer

Adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya serta kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga yang berada dibawah pengaruhnya, (pasal 4 ayat 3).

c. Jalan Lokal Primer

Adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga dengan jenjang ketiga lainnya, kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang a dengan persil serta ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga an kota jenjang dibawahnya sampai dengan persil (pasal 4 ayat 4).



Jaringan jalan terdiri dari ruas–ruas jalan yang menghubungkan satu dengan yang lain pada titik pertemuan yang merupakan simpul–simpul transportasi yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jalan. Jaringan jalan berdasarkan sistem (pelayanan penghubung) seperti terlihat pada Gambar Hierarki Jalan (di bawah) terbagi atas menurut (Miro, 1997:28 dalam Yusuf 2017):

- 1) Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota/ wilayah di tingkat nasional.
- 2) Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan zona–zona, kawasan–kawasan (titik simpul didalam kota).

Sedangkan berdasarkan peranannya, jaringan jalan dapat dibagi atas menurut (Miro, 1997:28 dalam Yusuf 2017):

- 1) Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata–rata tinggi dan jumlah masuk (*accses road*) dibatasi secara efisien.
 - 2) Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang dengan kecepatan rata–rata sedang dan jumlah jalan masuk masih dibatasi.
 - 3) Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan jarak dekat (angkutan setempat) dengan kecepatan rata–rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Drainase

Dr. Ir. Suripin, M.Eng. (2004;7 dalam Yusuf 2017) mengatakan bahwa drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase

artikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam
ya dengan salinitas.



Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara–cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. (Suhardjono 1948:1 dalam Yusuf 2017) Jenis Drainase terbagi menjadi:

- a. Drainase utama
- b. Drainase sekunder
- c. Drainase tersier
- d. Drainase laut

Drainase merupakan salah satu faktor pengembangan irigasi yang berkaitan dalam pengolahan banjir (*float protection*), sedangkan irigasi bertujuan untuk memberikan suplai air pada tanaman. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

5. Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih haruslah memenuhi dua syarat yaitu kuantitas dan kualitas (Depkes RI, 2005 dalam Yusuf 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang "Syarat–Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air ", air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari–hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Adapun syarat–syarat kesehatan air bersih adalah:

a. Persyaratan Biologis

Persyaratan biologis berarti air bersih itu tidak mengandung mikroorganisme yang nantinya menjadi infiltran tubuh manusia. Mikroorganisme itu dapat dibagi dalam empat grup, yakni parasit, bakteri, virus, dan kuman. Dari keempat jenis mikroorganisme tersebut umumnya yang menjadi parameter kualitas air adalah bakteri seperti *Eschericia Coli*.

Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik air bersih terdiri dari kondisi fisik air pada umumnya, yaitu derajat keasaman, suhu, kejernihan, warna, bau. Aspek fisik ini



sesungguhnya selain penting untuk aspek kesehatan langsung yang terkait dengan kualitas fisik seperti suhu dan keasaman tetapi juga penting untuk menjadi indikator tidak langsung pada persyaratan biologis dan kimiawi, seperti warna air dan bau.

c. Persyaratan Kimia

Persyaratan kimia menjadi penting karena banyak sekali kandungan kimiawi air yang memberi akibat buruk pada kesehatan karena tidak sesuai dengan proses biokimiawi tubuh. Bahan kimiawi seperti *nitrat*, *arsenic*, dan berbagai macam logam Universitas Sumatera Utara berat khususnya air raksa, timah hitam, dan cadmium dapat menjadi gangguan pada faal tubuh dan berubah menjadi racun.

d. Persyaratan Radioaktif

Persyaratan radioaktif sering juga dimasukkan sebagai bagian persyaratan fisik, namun sering dipisahkan karena jenis pemeriksaannya sangat berbeda, dan pada wilayah tertentu menjadi sangat serius seperti di sekitar reaktor nuklir.

Persyaratan dalam penyediaan air bersih:

1) Persyaratan kualitatif

Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat–Syarat dan Pengawasan Kualitas Air (Slamet, 2007 dalam Yusuf 2017).

Air yang memenuhi persyaratan fisik adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu sebaiknya dibawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah.

2) Persyaratan kuantitatif

Kebutuhan masyarakat terhadap air bervariasi dan bergantung pada iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat (Chandra, 2006 dalam Yusuf 2017). Konsumsi air bersih di perkotaan Indonesia berdasarkan



keperluan rumah tangga, diperkirakan sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk mandi,cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter, lain–lain 33,3 liter (Slamet, 2007 dalam Yusuf 2017).

3) Persyaratan kontinuitas

6. Persampahan

Adapun pengertian sampah menurut para ahli :

World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006 dalam Yusuf 2017). Undang–Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari–hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Juli Soemirat (1994) dalam Yusuf 2017 berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.

Azwar (1990) dalam Yusuf 2017 mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya.

Manik (2003) dalam Yusuf 2017 mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung sebagai berikut:

...anya sesuatu benda atau bahan padat



- b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003 dalam Yusuf, 2017).

H. Tahapan Budidaya Rumput Laut di Perairan Pantai

Menurut Indriani & Suminarsih (1999) dalam Bambang Priono 2013, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya rumput laut di perairan pantai, yaitu:

1. Pemilihan Lokasi

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan adalah: perairan cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak; tersedianya sediaan rumput alami setempat (indikator); kedalaman tidak boleh kurang dari dua kaki (sekitar 60 cm) pada saat surut terendah dan tidak lebih dari tujuh kaki (sekitar 210 cm) pada saat pasang tertinggi. Selain itu, juga harus didukung dasar perairan (tipe dan sifat substrat) yang digunakan, dasar perairan sedikit berlumpur atau berpasir, perairan subur atau kurang subur (plankton banyak atau sedikit). Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kualitas air, akses tenaga kerja, perizinan, dan sebagainya.

2. Uji Penanaman

Setelah menemukan lokasi yang dianggap sudah layak, perlu dilakukan uji penanaman untuk mengetahui apakah daerah tersebut memberikan pertumbuhan yang baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan metode tali dan metode jaring. Pada metode tali digunakan tali *monofilamen* atau *polyethylene* yang diikatkan pada dua tiang pancang yang dipasang dengan jarak sekitar 12 m. Sedangkan pada metode jaring dapat menggunakan jaring *monofilament* atau *polyethylene* dengan ukuran 5 m x 2,5 m yang diikatkan pada tiang pancang.

3. Menyiapkan Areal Budidaya

Persiapan lahan/areal budidaya sebagai berikut:

- a. Bersihkan dasar perairan lokasi budidaya dari rumput laut liar dan tanaman pengganggu lain yang biasa tumbuh subur.
- b. Bersihkan calon lokasi dari karang, batu, bintang laut, bulu babi, maupun hewan predator lainnya.



- c. Menyiapkan tempat penampungan benih (*seed bin*), bisa terbuat dari kerangka besi dan berjaring kawat atau dari rotan, bambu, ukurannya bervariasi 2 m x 2 m x 1,5 m atau 2 m x 2 m x 1,5-1,7 m.

4. Memilih Metode Budidaya yang akan Digunakan

Membudidayakan rumput laut di lapangan (*field culture*) dapat dilakukan dengan tiga macam metode berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan, yakni metode dasar, metode lepas dasar, dan metode apung.

- a. Metode dasar (*bottom method*) adalah metode pembudidayaan rumput laut menggunakan benih bibit tertentu, yang telah diikat, kemudian ditebarkan ke dasar perairan, atau sebelum ditebarkan benih diikat dengan batu karang. Metode ini juga terbagi atas dua yaitu: metode sebaran (*broadcast*) dan juga metode budidaya dasar laut (*bottom farm method*).
- b. Metode lepas dasar (*off – bottom method*) dilakukan dengan mengikat benih rumput laut (yang diikat dengan tali rafia) pada rentangan tali nilon atau jaring di atas dasar perairan dengan menggunakan pancangpancang kayu. Metode ini terbagi atas: metode tunggal lepas dasar (*off – bottom monoline method*), metode jaring lepas dasar (*off – bottom – net method*), dan metode jaring lepas dasar berbentuk tabung (*off bottom – tabular - net method*).
- c. Metode apung (*floating method*) merupakan rekayasa bentuk dari metode lepas dasar. Pada metode ini tidak lagi digunakan kayu pancang, tetapi diganti dengan pelampung. Metode ini terbagi menjadi: metode tali tunggal apung (*floating – monoline method*) dan metode jaring apung (*floating net method*).

5. Penyediaan Bibit

Setelah dipilih metode budidaya yang akan dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyediaan bibit. Bibit dikumpulkan dari pembibitan langsung, dilakukan dengan beberapa metode pengumpulan benih, yaitu:

Metode penyebaran secara spontan: potongan – potongan (*fragmen trasporotphyte*) diletakkan pada jaring-jaring benih (*seed nets*) dan dapat pula diletakkan pada potongan – potongan batu di dalam tangki



pengumpul yang telah diisi air laut. Setelah itu, dibiarkan hingga tetraspora menyebar secara spontan.

- b. Metode kering: *tetrasporophyte* dikeringkan di bawah sinar matahari selama tiga jam, kemudian ditempatkan dalam tangki seperti pada metode penyebaran secara spontan. Prosedur berikutnya sama dengan metode penyebaran secara spontan.
- c. Metode kejutan osmotik: *tetrasporophyte* direndam dalam air laut berkonsentrasi $1,030 \text{ g/cm}^3$ selama 25 menit, kemudian direndam ke dalam air laut berkonsentrasi normal sambil diaduk dan akhirnya suspensi spora dapat diperoleh.

6. Penanaman Bibit

Bibit yang akan ditanam adalah talus yang masih muda dan berasal dari ujung talus tersebut. Saat yang baik untuk penebaran maupun penanaman benih adalah pada saat cuaca teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah pagi hari atau sore hari menjelang malam.

7. Perawatan Selama Pemeliharaan

Seminggu setelah penanaman, bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan yang teratur dan kontinu (adanya penyakit *ice-ice*, ikatan bibit lepas, bibit rusak, adanya hama tritip, dan lain sebagainya). Pengawasan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penggantian bibit atau membersihkan dari kotoran atau hama yang mungkin muncul. Bila kondisi perairan kurang baik, seperti ombak yang keras, angin, serta suasana perairan yang banyak dipengaruhi kondisi musim (hujan/kemarau), perlu pengawasan 2–3 hari sekali.

8. Pemanenan

Pemanenan dapat dilakukan bila rumput laut telah mencapai bobot tertentu, yakni sekitar empat kali bobot awal (waktu pemeliharaan 1,5–4 bulan). Cepat tidaknya pemanenan bergantung metode dan perawatan yang dilakukan bibit ditanam.



9. Pengeringan Hasil Panen

Penanganan pascapanen, termasuk pengeringan yang tepat sangat perlu, mengingat pengaruh langsungnya terhadap mutu dan harga penjualan di pasar.

I. Tinjauan Khusus

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantaeng

a. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah Selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah $395,83 \text{ km}^2$.

Wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Bissappu ($32,84 \text{ km}^2$), Uluere ($67,29 \text{ km}^2$), Sinoa (43 km^2), Bantaeng ($28,85 \text{ km}^2$), Eremerasa ($45,01 \text{ km}^2$), Tompobulu ($76,99 \text{ km}^2$), Pajukukang ($48,9 \text{ km}^2$), dan Gantarangekeke ($52,95 \text{ km}^2$).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bantaeng terdiri dari:

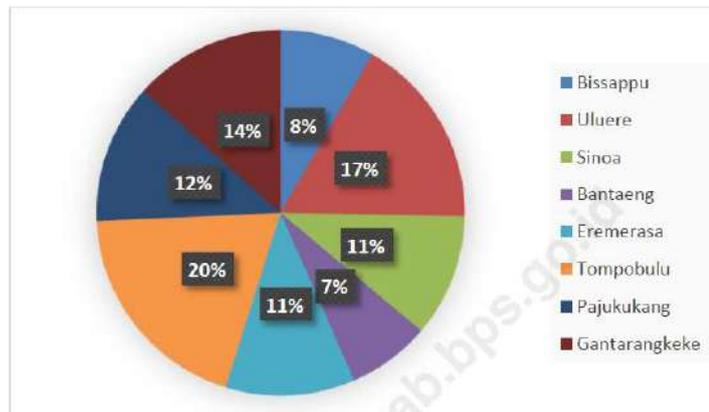
- 1) 25 m – 100 m = 37,5 %
- 2) 100 m – 500 m = 12,5 %
- 3) 300 m – 500 m = 12,5 %
- 4) 500 m – 1000 m = 37,5 %

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

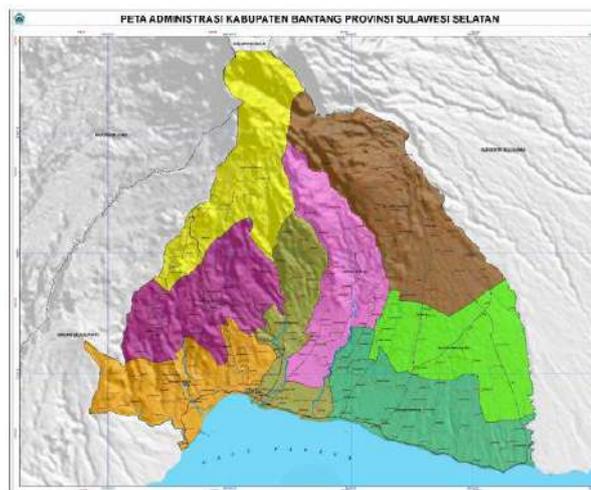
- 1) Bantaeng – Bissappu : 4 km.
 - 2) Bantaeng – Uluere : 23 km.
 - 3) Bantaeng – Sinoa : 14 km.
 - 4) Bantaeng – Eremerasa : 5 km.
 - 5) Bantaeng – Tompobulu : 21 km.
- Bantaeng – Pajukukang : 7 km.
Bantaeng – Gantarangekeke : 11 km.



Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jenepono.



Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2016
 (Sumber : Kabupeten Bantaeng Dalam Angka, 2017)
 (Diakses : 13-10-2018)



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bantaeng
 (Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka, 2017)
 (Diakses : 13-10-2018)

asasan Permukiman di Kabupaten Bantaeng

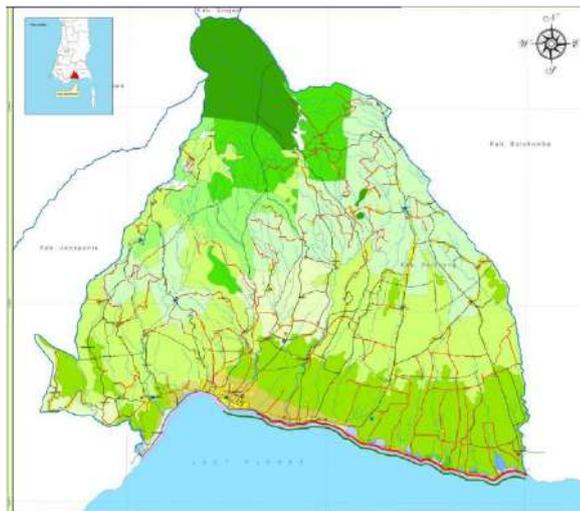
ermukiman perkotaan berorientasi pada pusat kota Bantaeng dan daerah
 bangan permukiman di sekitar pusat kota terutama di Kecamatan



Bantaeng, Bissappu dan Pajukukang. Sedangkan Rencana pengembangan permukiman perdesaan dengan melihat kondisi kegiatan agraris dengan bangunan yang mengarah ke unsur budaya lokal Kabupaten Bantaeng berada pada kecamatan yang terletak bagian utara Kabupaten Bantaeng yaitu Kecamatan Ulu Ere, Eremerasa dan Tompobulu.

c. Kawasan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di Kabupaten Bantaeng

Rencana pengembangan wilayah pesisir diprioritaskan pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Kecamatan yang termasuk dalam rencana pengembangan wilayah pesisir adalah Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pajukukang.



Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng
(Sumber : RTRW Kabupaten Bantaeng, 2011)
(Diakses : 14-03-2019)

d. Kondisi Klimatologi Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata–rata setiap bulan 490,17 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 426 hari per tahun. Temperatur udara rata–rata 23⁰C sampai 33⁰C dengan dua musim dan perubahan iklim setia tahunnya yang sangat spesifik karena merupakan daerah peralihan Iklim Barat (Sektor Barat) dan Iklim Timur (Sektor Timur) dari

Sulawesi Selatan. (Bantaeng Dalam Angka, 2012)

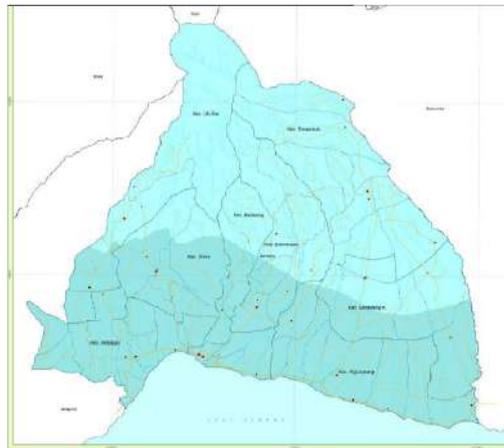
Oktober – Maret, intensitas hujan rendah tetapi merata.

April – Juli, intensitas hujan tinggi terutama Juni – Juli.



3) Kemarau yang ekstrim hanya periode Agustus – September.

Pada saat sektor barat musim hujan yaitu antara bulan Oktober s/d Maret, Kabupaten Bantaeng juga mendapatkan hujan dan pada musim timur yang berlangsung antara April s/d September, Kabupaten Bantaeng juga mendapat hujan. Akibat dari pengaruh dua iklim ini, maka sebagian besar wilayah Bantaeng mendapat curah hujan merata sepanjang tahun. Sifat hujan pada musim barat curah hujannya relatif rendah, tetapi hari hujannya agak panjang, sedangkan sifat hujan sektor timur curah hujannya lebih deras tetapi hari hujannya relatif pendek.



Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bantaeng
(Sumber : RTRW Kabupaten Bantaeng, 2011)
(Diakses : 14-03-2019)

e. Kependudukan Kabupaten Bantaeng

Penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 184.517 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,62 persen.

Angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94, yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu 95.532 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 88.985 jiwa.



Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2016 mencapai 466 jiwa/km², yang berarti bahwa dalam satu km² di huni oleh 466 penduduk. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.329 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 168 jiwa/km².

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 10–14 tahun yaitu sebanyak 17.717 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70–74 tahun yaitu sebanyak 2.838 jiwa.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus tahun 2015, penduduk usia kerja Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015 sebanyak 131.841 jiwa dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 72,83 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja terdapat 73 penduduk yang merupakan angkatan kerja. Dan juga, TPAK laki–laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, yaitu sebesar 84,84 persen.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebanyak 3.904 jiwa, sehingga tingkat pengangguran mencapai 4,07 persen. Tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki–laki. Tingkat pengangguran perempuan mencapai 5,24 persen, sedangkan laki–laki mencapai 3,11 persen.

Penduduk usia kerja yang termasuk dalam pangangguran terbuka paling banyak berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 19,36 persen, kemudian Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 18,95 persen.

Penduduk usia kerja yang bekerja paling banyak dalam kelompok umur 25–29 tahun, yaitu sebanyak 13.217 jiwa atau 14,35 persen dan didominasi oleh penduduk laki–laki yaitu sebanyak 7.073 jiwa.

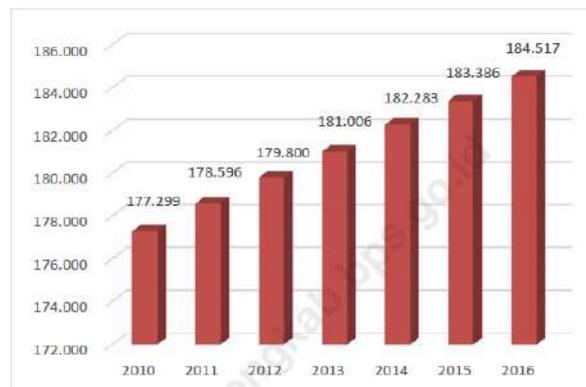
Lapangan pekerjaan utama penduduk Bantaeng sebagian besar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 51,78 persen

adalah penduduk yang bekerja.



Berdasarkan jumlah jam kerja seluruhnya, sebagian besar penduduk yang bekerja mempunyai jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu yang lalu, yaitu sebesar 53,44 persen yang didominasi oleh penduduk laki-laki.

Sementara itu, berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja paling banyak merupakan pekerja bebas di non pertanian yaitu sebesar 25,04 persen dan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 22,71 persen.



Gambar 2.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantaeng (iwa), Tahun 2010 – 2016
(Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka, 2017)
(Diakses : 13-10-2018)

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (jiwa) Population (people)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2015	2016	2010- 2016	2015- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bissappu	31 036	32 101	32 299	0,67	0,62
2. Uluere	10 850	11 223	11 291	0,67	0,61
3. Sinoa	11 867	12 274	12 350	0,67	0,62
4. Bantaeng	36 842	38 105	38 341	0,67	0,62
5. Eremerasa	18 678	19 320	19 439	0,67	0,62
6. Tompobulu	22 992	23 783	23 929	0,67	0,61
7. Pajukukang	29 115	30 113	30 300	0,67	0,62
8. Gantarangkeke	15 919	16 467	16 568	0,67	0,61
Bantaeng	177 299	183 386	184 517	0,67	0,62

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2010, 2015, dan 2016
(Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka, 2017)
(Diakses : 13-10-2018)



f. Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Bantaeng

Rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 dalam BPS Bantaeng sebanyak 2,88 ton per rumah tangga. Jumlah produksi tersebut meningkat 5,00 persen dibandingkan tahun 2015. Sedangkan, rata-rata produksi perikanan budidaya lebih banyak dibandingkan perikanan tangkap yaitu sebanyak 18,15 ton per rumah tangga.

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Keramba Jaring Apung Floating Net	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Bissappu	18 257,33	45,63	-	-	18 302,96
2 Uluere	-	-	5,17	-	5,17
3 Sinoa	-	-	0,50	-	0,50
4 Bantaeng	16 149,03	1,77	4,91	-	16 155,71
5 Eremerasa	-	-	5,00	-	5,00
6 Tompobulu	-	-	12,26	-	12,26
7 Pajukukang	48 221,61	167,69	3,83	3,90	48 397,03
8 Gantarangkeke	-	-	-	-	0,00
Bantaeng	82 627,97	215,09	31,67	3,90	82 878,63

Gambar 2.7 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bantaeng (Ton), Tahun 2016
(Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka, 2017)
(Diakses : 14-10-2018)

Wilayah yang agak jauh dari daerah pantai dikembangkan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang terdiri atas :

- 1) Budidaya tambak terdapat di Kecamatan Bissappu, Bantaeng, dan Pajukukang.
- 2) Budidaya kolam terdapat di Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Tompobulu, Ulu Ere dan Eremerasa.

Pengolahan ikan merupakan kegiatan industri pengolahan ikan yang dikembangkan disepanjang kawasan pesisir terutama di Kampung Bakara Kecamatan Pajukukang.



Selain perikanan laut dan darat ada pula yang dapat dikembangkan yaitu Rumput Laut. Rumput laut yang dikembangkan di Sulawesi Selatan terdiri dari 2 jenis komoditas yaitu *Gracillaria sp* yang dikembangkan di lokasi tambak–tambak marginal, dan *E.Cottoni* yang dikembangkan di perairan pesisir. Lokasi rumput laut di kabupaten Bantaeng berada di sepanjang wilayah pesisir dengan luasan sekitar 13 Ha. Produksi rumput laut dapat dikembangkan disepanjang pantai pada Kecamatan Pajukukang sebesar 1.144 ton pertahun. (BPS Bantaeng, 2012).

2. Gambaran Wilayah Kecamatan Bisappu

a. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Bisappu

Kecamatan Bissappu adalah salah satu Kecamatan dari 8 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng. Secara fisik Kecamatan Bissappu yang berbatasan dengan Kecamatan Sinoa / Uluere di Sebelah Utara, Kecamatan Bantaeng di Sebelah Timur, Kabupaten Jeneponto di Sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Ibu kota Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terletak di Kelurahan Bonto Lebang yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonto Salluang
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonto Jai
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai

Sungai–sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Bissappu diantaranya yaitu:

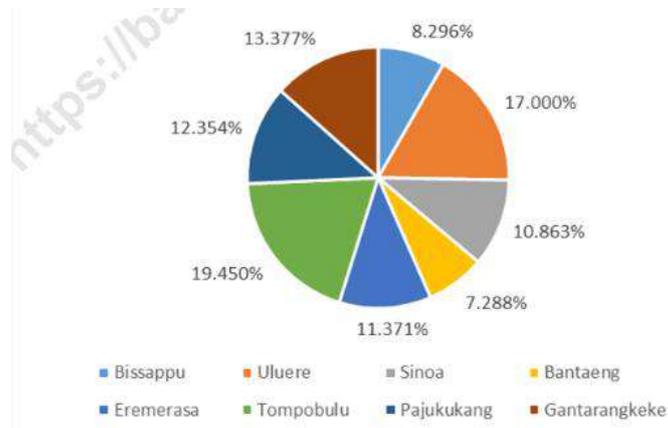
- 1) Sungai Tino
- 2) Sungai Cabodo
- 3) Sungai Batu Rinring
- 4) Sungai Lemoso

Berdasarkan pencatatan dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I

g, pada tahun 2016 rata–rata curah hujan per hari paling banyak pada Juni yaitu 30,25 mm³ per hari dengan curah hujan sebanyak 363 mm³ 2 hari. Luas wilayah Kecamatan Bissappu tercatat 32,84 km² atau 8,3



persen dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 3 desa dan 7 kelurahan.



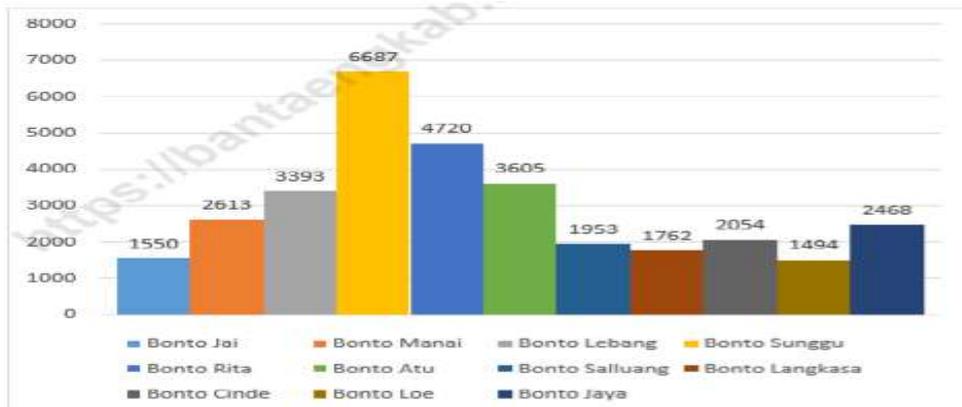
Gambar 2.8 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Bissappu di Kabupaten Bantaeng
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-03-2019)

Kecamatan Bissappu terdiri dari 3 desa dan 7 kelurahan, yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Bonto Jaya dengan luas 3,75 km² disusul Desa Bonto Loe dengan luas 3,74km². Keadaan iklim wilayah kecamatan Bissappu yakni mempunyai iklim tropis. Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober/November sampai Maret/April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei/Juni sampai Agustus/September. Biasanya pada bulan Desember sampai Februari curah hujan cukup tinggi.

b. Jumlah Penduduk Kecamatan Bissappu

Penduduk Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2016 berjumlah 32.299 jiwa yang terdiri dari 16.550 laki-laki dan 16.639 perempuan. Penduduk Kecamatan Bissappu tersebar di 10 desa/kelurahan dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu sebanyak 6.687 jiwa.

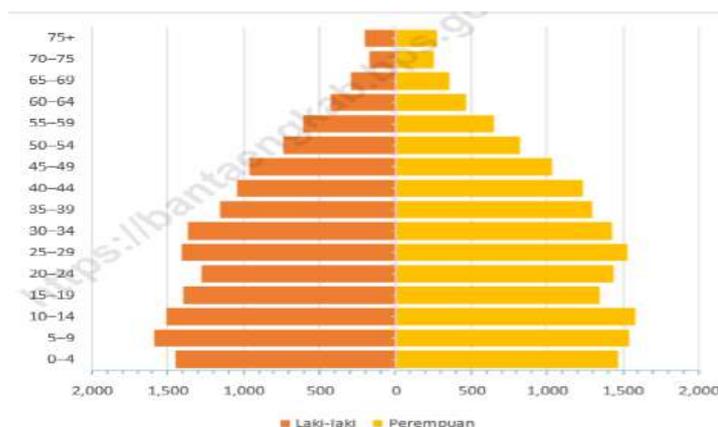




Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bisappu Tahun 2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-02-2019)

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat tercermin dari angka perbandingan antara jenis kelamin atau yang biasa disebut rasio jenis kelamin. Sementara, rasio jenis kelamin yang tertinggi terletak pada Kelurahan Bonto Sunggu, sedang rasio jenis kelamin yang terendah terdapat di Desa Bonto Cinde. Rasio jenis kelamin Kecamatan Bissappu adalah 95, artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki.

Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan daerah suatu penduduk.



Gambar 2.10 Piramida Penduduk di Kecamatan Bisappu Tahun 2016
(Sumber : Badan Pusat Statiski Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-03-2019)



Berdasarkan piramida penduduk di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Bissappu terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah yang menyebabkan penduduk berumur muda banyak. Piramida penduduk jenis ini biasa disebut dengan *Piramida Expansive* dengan ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan pertumbuhan penduduk tinggi.

c. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bisappu

Wilayah Kecamatan Bissappu termasuk wilayah yang potensial untuk tanaman pertanian tanaman pangan, selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Bissappu adalah jagung. Produksi padi di wilayah Kecamatan Bissappu pada tahun 2016 sebesar 15.827 ton dengan areal panen seluas 2.426 hektar. Produktivitas padi di wilayah ini pada tahun 2015 sebesar 59,93 kwintal perhektar meningkat menjadi 65,24 kwintal per hektar pada tahun 2016.



Gambar 2.11 Produksi Padi di Kecamatan Bisappu (Ton) Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-03-2019)

Jenis produksi tanaman perkebunan di wilayah Kecamatan Bissappu yang merupakan unggulan dan terbesar hasilnya adalah kapuk dan kelapa. Jumlah produksi untuk tanaman kapuk pada tahun 2016 sebanyak 973 ton dan produksi kelapa sebanyak 414 ton di wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.





Gambar 2.12 Produksi Perkebunan di Kecamatan Bisappu (Ton) Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-03-2019)

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sangat potensial untuk usaha di bidang peternakan baik itu untuk ternak besar maupun untuk ternak kecil. Selain itu, usaha peternakan unggas juga sangat cocok untuk dikembangkan. Pada tahun 2016 populasi ternak besar di wilayah Kecamatan Bissappu untuk ternak sapi potong meningkat sebanyak 6,82 persen, kuda meningkat sebanyak 8,55 persen. Sedangkan, ternak kerbau sama dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.13 Populasi Ternak Besar di Kecamatan Bisappu (Ekor) Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2017)
(Diakses : 18-03-2019)

Di Wilayah Kecamatan Bissappu terdapat beberapa sarana perekonomian sebagai tempat pertemuan antara produsen dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya sarana tersebut maka kebutuhan pokok masyarakat yang berdomisili di tempat tersebut dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar dari wilayahnya. Begitu pula untuk produsen menjual hasil pertaniannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup



besar, sehingga dapat menambah pendapatan. Adapun jumlah sarana perekonomian seperti pasar dan pertokoan/kios/warung dan lembaga perekonomian lainnya di Wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2016, yaitu terdapat pasar sebanyak 2 buah, toko sebanyak 334 buah, kios/warung sebanyak 1.012 buah.

d. Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bissappu

Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng membawahi 4 desa dan 7 kelurahan dengan ibukota wilayah kecamatan berkedudukan di Kelurahan Bonto Lebang. Jarak dengan ibu kota kabupaten yaitu 4 km². Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dari sejumlah desa/kelurahan yang ada, masing–masing desa/kelurahan membawahi beberapa lingkungan, dusun, RK/RW dan RT. Adapun jumlah lingkungan di Kecamatan Bissappu sebanyak 15, dusun sebanyak 13, RW sebanyak 73, dan RT sebanyak 176.

3. Gambaran Wilayah Kelurahan Bonto Lebang

a. Kondisi Geografis Kelurahan Bonto Lebang

Letak Kelurahan Kelurahan Bonto Lebang adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Bissappu yang berada dibagian Barat Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Kelurahan Bonto Lebang dari ibu kota kecamatan 0 km (kurang lebih 500 meter) dan Ibukota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 4 km. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 1,01 Km², dengan potensi lahan yang produktif seperti lahan perkebunan dan pertanian. Ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah sekitar 5 mdpl. Dengan luas wilayah 301 Ha, yang terbagi atas luas pemukiman 12,80 Ha, Luas persawahan 198 Ha, Luas perkebunan 16,80 Ha, Luas pekuburan 2,00 Ha, Luas pekarangan 1,60 Ha, Luas sarana umum (Kantor/Instansi pemerintah) 6,00 Ha, dan Luas ladang/kebun 57 Ha, serta hutan rakyat 6,80 Ha. (Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017).



Adapun batas–batas Kelurahan Bonto Lebang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Bonto Salluang
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Laut Flores

Tabel 2.1 Batas-Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang
(Sumber : Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017)

b. Administrasi Kelurahan Bonto Lebang

Pusat pemerintahan Kelurahan Bonto Lebang terletak di kampung Beloparang dan secara administratif Kelurahan Bonto Lebang terbagi atas 3 Kampung yaitu :

- 1) Kampung Beloparang terdiri dari 2 RW yaitu RW I dan RW II
- 2) Kampung Cambalajong terdiri dari 1 RW yaitu RW III
- 3) Kampung Kaili terdiri dari 1 RW yaitu RW IV

Setiap RW dipimpin oleh seorang Ketua RW (Rukun Warga) yang di bantu oleh Beberapa Ketua RT (Rukun Tetangga) yakni :

- 1) RW I Kampung Beloparang membawahi 3 RT
- 2) RW II Kampung Beloparang membawahi 4 RT
- 3) RW III Kampung Cambalajong membawahi 4 RT
- 4) RW IV Kampung Kaili membawahi 2 RT

c. Topografi Kelurahan Bonto Lebang

Kelurahan Bonto Lebang memiliki kondisi daerah yang termasuk dalam kategori dataran yang datar dan sebagian di wilayah pesisir. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

d. Kependudukan Kelurahan Bonto Lebang

Jumlah penduduk Kelurahan Bonto Lebang berjumlah 3.982 jiwa yang terdiri dari 1.885 laki–laki dan 2.097 perempuan sedangkan jumlah rumah sebanyak 937 KK. (Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017).



Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia: (Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017).

Penduduk Usia 00 - 05 Tahun	562 Orang
Penduduk Usia 06 - 10 Tahun	620 Orang
Penduduk Usia 11 - 15 Tahun	482 Orang
Penduduk Usia 16 - 25 Tahun	771 Orang
Penduduk Usia 26 - 50 Tahun	1151 Orang
Penduduk Usia 51 - 70 Tahun	332 Orang
Penduduk Usia 70 Tahun Ke atas	64 Orang

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Usia Kelurahan Bonto Lebang
(Sumber : Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017)

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian: (Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017).

Pegawai Negeri Sipil	312 Orang
ABRI / Polri	10 Orang
Karyawan Swasta	75 Orang
Wiraswasta / pedagang	600 Orang
Petani / Pekebun	975 Orang
Petani Rumput Laut	256 Orang
Pensiunan	50 Orang
Jasa Transportasi	170 Orang

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Bonto Lebang
(Sumber : Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017)

e. Sarana dan Prasarana Kelurahan Bonto Lebang

Peribadatan	
Masjid	5 Buah
Mushollah	6 Buah
Gereja	- Buah



Pendidikan	
- TK	2 Buah
- SD	2 Buah
- SMP	1 Buah
Sarana Olah Raga	
- Lapangan Sepakbola	1 Buah
- Lapangan Bola Volley	1 Buah
- Lapangan Sepak Takraw	2 Buah
- Lapangan Tennis Meja	1 Buah
Perdagangan	
- Toko	2 Buah
- Warung	21 Buah
- KUD	1 Buah
Sarana Kebersihan	
- Bak Sampah Permanen	7 Buah
- Tempat Sampah Semi Permanen	10 Buah
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1 Buah

Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bonto Lebang
(Sumber : Profil Kelurahan Bonto Lebang, 2017)

f. Potensi Kelurahan Bonto Lebang

1) Keamanan

Pada masing–masing RW terdapat Pos Kamling dan juga para anggota Linmas/Hansip melakukan piket jaga tiap malam dibawah koordinator Babinsa Kelurahan Bonto Lebang dan Bapak Babinkamtibmas an Bonto Lebang. Hal ini dimaksudkan agar didapatkan rasa aman dan ketenangan serta keamanan dalam wilayah Kelurahan Bonto



Lebang dan diharapkan mampu untuk dapat menekan angka – angka kejahatan/kriminalitas di Kelurahan Bonto Lebang.

2) Kebersihan

Untuk penanganan persampahan di Kelurahan Bonto Lebang, setiap RW sudah mempunyai Bak Sampah untuk menampung sampah basah maupun kering. Dan Aparat Kelurahan Bonto Lebang tidak henti-hentinya untuk mengingatkan akan pentingnya kebersihan lingkungan baik lingkungan didalam rumah maupun lingkungan di luar rumah. Apalagi di Kelurahan Bonto Lebang terdapat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota dan pedesaan.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang sudah sangat baik yang ditandai dengan adanya peran serta masyarakat yang lebih baik, lebih aspiratif dan partisipatif dalam segala bentuk pembangunan baik yang diselenggarakan oleh Kelurahan Bonto Lebang maupun kegiatan akselerasi lainnya seperti PNPM-MP dan kegiatan LPM.

4) Permukiman

Kelurahan Bonto Lebang terdiri dari 2 bentuk geografis kewilayahan yakni sebelah selatan merupakan daerah pantai dengan panjang pesisir pantai kurang lebih 1 Km dan disebelah Utara merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Sedangkan disebelah Barat terdapat Kompleks Perkantoran yang terdiri dari Kantor Camat Bissappu, Kantor BRI Unit Bonto Manai, Kantor Koramil 1410-03, Kantor PDAM Cabang Bissappu, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bissappu serta 1 Unit Sekolah Menengah Pertama.

Kelurahan Bonto Lebang memang sangat berpotensi sebagai kawasan permukiman karena didukung topografi pantai yang relatif datar dan tingkat keterlerangan berkisar 0–8 %, serta terletak pada ketinggian kurang lebih 5 mdpl.

Ditambah lagi faktor lokasi Kelurahan Bonto Lebang yang merupakan Pusat Ibu Kecamatan Bissappu telah mempunyai sarana prasarana yang relatif dan kemudahan akses untuk menjangkau lokasi fasilitas umum yang kan masyarakat.



5) Kelembagaan

Kelembagaan dari 4 pilar (Kelurahan, LPM, Karang Taruna, PKK) sudah terjalin dengan baik, sehingga pembangunan dalam bidang bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha dapat berjalan lancar terlebih lagi partisipasi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang sangat baik dan dari hari ke hari terus meningkat.

